

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS FUNGSI WAKIL PRESIDEN DALAM SISTEM
KETATANEGARAAN INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH
AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR 1945**



Oleh:

Muhammad Samsul Huda

1600024221

**Skripsi Ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

2023

THESIS

**JURIDICAL ANALYSIS OF THE VICE PRESIDENT'S FUNCTIONS IN
THE INDONESIAN STATE SYSTEM BEFORE AND AFTER THE
AMENDMENT TO THE 1945 CONSTITUTIONAL ACT**



Written by:

Muhammad Samsul Huda

1600024221

**This Thesis Submit As A Fullfill Ment Of The Requitment To Attain The Bachelor
Degree Of Legal Studies**

FACULTY OF LAW

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS YURIDIS FUNGSI WAKIL PRESIDEN DALAM SISTEM
KETATANEGARAAN INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH
AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

**Skripsi Ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan**



Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Megawati', is written over the printed name and NIP.

Dr. Hj. Megawati, S.H., M.Hum.

NIP : 195806071986022001

APPROVAL PAGE

**URIDICAL ANALYSIS OF THE VICE PRESIDENT'S FUNCTIONS IN THE
INDONESIAN STATE SYSTEM BEFORE AND AFTER THE AMENDMENT
TO THE 1945 CONSTITUTIONAL ACT**

**This Thesis Submit As A Fulfillment Of The Requirement To Attain The Bachelor
Degree Of Legal Studies At Faculty Of Law Universitas Ahmad Dahlan**



Supervisor,

Dr. Hj. Megawati, S.H., M.Hum.

NIR : 195806071986022001

HALAMAN PENGESAHAN

**DIPERTAHANKAN DI DEPAN DEWAN PENGUJI SKRIPSI FAKULTAS
HUKUM UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN UNTUK MELENGKAPI
PERSYARATAN DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM**

Pada Tanggal:

DEWAN PENGUJI

Ketua Penguji : Dr.Hj. Megawati, S.H., M.Hum.

Anggota Penguji : Dr. Drs. H. Immawan Wahyudi, S.H., M.H.

Anggota Penguji : Nurul Satria Abdi, S.H., M.H.



Mengesahkan,

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Ahmad Dahlan**



Dr.Hj. Megawati, S.H., M.Hum.

NIP : 195806071986022001

APPROVAL PAGE

**ACCEPTED BY THE EXAMINER BOARD OF FACULTY OF LAW OF
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN TO BE SUBMITTED AS A FULFILLMENT
OF THE REQUIREMENTS TO ATTAIN BACHELORDEGREE OF LAW**

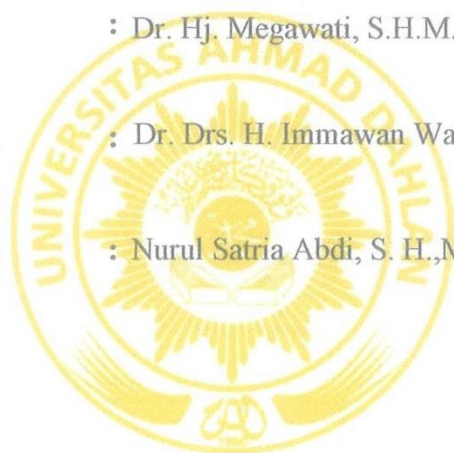
At the Date:

THE EXAMINERBOARD:

Chairman : Dr. Hj. Megawati, S.H.M.Hum.

Examiner 1 : Dr. Drs. H. Immawan Wahyudi, M.H.

Examiner 2 : Nurul Satria Abdi, S. H.,M.H.

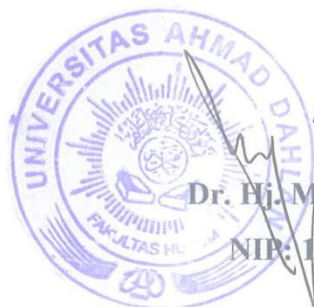


Three handwritten signatures in black ink are positioned to the right of the examiners' names. Each signature is written over a horizontal dotted line. The top signature is the most prominent, followed by a second and then a third signature below it.

Approved by,

Dean of Faculty of Law

Universitas Ahmad



Dr. Hj. Megawati, S.H., M.Hum.

NIP: 195806071986022001

PERNYATAAN TIDAK PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Samsul Huda

NIM : 1600024221

Email : muhsamsul2@gmail.com

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Fungsi Wakil Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Sebelum Dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Ahmad Dahlan maupun di institusi pendidikan lainnya.
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian.
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing.
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Ahmad Dahlan.

Yogyakarta, 26 Desember 2022




Muhammad Samsul Huda

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Samsul Huda

NIM : 1600024221 Email :

Fakultas : Hukum Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Tugas Akhir : ANALISIS YURIDIS FUNGSI WAKIL PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Dengan ini saya menyerahkan hak *Sepenuhnya* kepada Pusat Sumber Belajar Universitas Ahmad Dahlan untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut (beri tanda pada kotak):

- Saya mengizinkan karya tersebut diunggah ke dalam aplikasi Repository Pusat Sumber Belajar Universitas Ahmad Dahlan.
- Saya mengizinkan karya tersebut diunggah ke dalam jurnal ilmiah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 09 Agustus 2023



Muhammad Samsul Huda

Tanda tangan & nama terang mahasiswa

Mengetahui,

Pembimbing



Dr. Hj. Megawati., S.H., M.Hum.

Tanda tangan & nama pembimbing

HALAMAN MOTTO

“Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa”

(Q.S. Al-Hujurat, 49: 13).

“Tasaroful Imam Ala Ro’iyatihi Manuwto Bilmaslahah (Kebijakan Pemimpin Harus Berdasarkan Kehendak Rakyat)”

(Kaedah Ushul Fiqhi)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang sungguh luar biasa

baiknya:

- ❖ Terimakasih kepada Allah SWT yang selalu mengabulkan doa-doa saya dan memberikan kelancaran disetiap langkah saya.
- ❖ Ayah saya, Sutaryono sosok yang selalu mendorong saya untuk sekolah dan selalu menasihati agar anaknya jangan pernah tidak menuntaskan sekolah hingga ke Perguruan Tinggi. Kemudian teruntuk Ibu saya Sri Mulyani, doamulah yang menembus langit, dirimu bukan saja sosok ibu dalam rumah tangga, namun juga sebagai sosok kepala rumah tangga pasca Ayah meninggalkan kita.
- ❖ Kakak-kakak saya yaitu Maya Sandra Rosita Dewi dan Seto Arya Utama. Terimakasih ada segala doa dan dukungan yang selalu diberikan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
- ❖ Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan.

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, dan tidak lupa kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang baik bagi umatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS FUNGSI WAKIL PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR 1945”**.

Penulisan hukum (skripsi) ini jauh dari kata sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Banyak pengalaman yang dapat diambil oleh penulis dalam penyusunan skripsi karena banyak hambatan, kekurangan dan permasalahan. Namun, berkat bimbingan, semangat, saran dan bantuan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis tulus mengucapkan terimakasih yang sebesar - besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Muchlas, M.T., selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan;
2. Dr. Megawati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan;
3. Bapak Nurul Satria Abdi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan;
4. Ibu Wita Setyaningrum, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan;
5. Bapak Fauzan Muhammadi, Lc., LL.M., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Ahmad Dahlan;
6. Ibu Dr. Megawati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, saran dan ilmu yang sangat bermanfaat, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

7. Ibu Dr. Norma Sari, S.H., M.hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah memberikan bimbingan selama penulis kuliah di Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan;
8. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan;
9. Para staff dan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan yang telah membantu menyelesaikan administrasi di Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan.

Penulis telah berusaha mengerjakan skripsi ini dengan semaksimal mungkin. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan kata, penulisan, maupun isi serta pembahasannya. Saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan agar bisa bermanfaat di masa yang akan datang bagi penulis sendiri maupun bagi masyarakat.

Yogyakarta, 26 Desember 2022

Muhammad Samsul Huda

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	iii
APPROVAL PAGE	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
APPROVAL PAGE	vi
PERNYATAAN TIDAK PLAGIASI.....	vii
PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES	viii
HALAMAN MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR.....	xi
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I PENDAHULUAN	17
A. Latar Belakang	17
B. Rumusan Masalah.....	24
C. Tujuan Penelitian	25
D. Manfaat Penelitian	25
E. Metode Penelitian	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	30
A. Penelitian Terlebih Dahulu	30
B. Kerangka Teori	31
1. Teori Konstitusi	31
2. Konsep <i>Check and balances</i>.....	35
3. Teori kewenangan	38
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Kedudukan Wakil Presiden Sebelum Amandemen UUD 1945.....	43
1. Kewenangan Wakil Presiden Sebelum Amandemen UUD 1945	43
2. Kewenangan Presiden Setelah Amandemen UUD 1945	49
B. Analisis Yuridis Fungsi Wakil Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945.....	54
1. Peranan Wakil Presiden sebelum Amandemen UUD 1945	55
2. Peranan Wakil Presiden Pasca Amandemen UUD 1945	63

BAB IV PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	73

ABSTRAK

Kedudukan Wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan sebelum dan sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 mengalami perubahan yang tidak begitu memiliki arti. Penelitian ini bertujuan melakukan analisis yuridis terhadap fungsi Wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebelum dan sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945.

Metode penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian yuridis normatif, yang menitikberatkan penelitian pada bahan pustaka. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun pengumpulan bahan menggunakan *studi literature*.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: *Pertama*, Wakil Presiden sebelum amandemen UUD 1945 dapat dikatakan setara dengan Menteri ssebagai pembantu Presiden. *Kedua*, Wakil Presiden setelah amandemen UUD 1945 dapat dikatakan cukup memiliki kewenangan yang kuat. Oleh karena dalam hal Presiden tidak berada di dalam negeri, maupun tidak bisa melaksanakan tugas lainnya karena hal mendesak.

Kata Kunci: Wakil Presiden, Amandemen, UUD 1945.

ABSTRACT

The position of Vice President in the constitutional system before and after the amendments to the 1945 Constitution underwent insignificant changes. This study aims to conduct a juridical analysis of the function of the Vice President in the Indonesian constitutional system before and after the Amendments to the 1945 Constitution.

The research method used is a normative juridical research type, which focuses on research on library materials. The legal materials used consist of primary legal materials and secondary legal materials. As for the collection of materials using literature studies.

The results of this study concluded that: First, the Vice President before the amendment to the 1945 Constitution could be said to be equivalent to the Minister as an assistant to the President. Second, the Vice President after the amendment to the 1945 Constitution can be said to have sufficiently strong authority. Because in the event that the President is not in the country, or cannot carry out other tasks due to urgent matters.

Keywords: Vice President, Amendments, 1945 Constitution.